



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKJIP)

DINAS
KESEHATAN
KOTA BLITAR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 dapat disusun. Dokumen ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar serta bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Laporan ini berupaya menggambarkan berbagai capaian kinerja yang dapat diraih oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar selama Tahun 2022 dengan membandingkannya terhadap target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022. Berbagai kebijakan dan upaya telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan Pembangunan Kesehatan di Kota Blitar, yaitu **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, dan mendukung Visi Pemerintah Kota Blitar, yaitu **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dengan berupaya mewujudkan Misi ke-2 Pembangunan Kota Blitar yaitu **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter”**.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Melalui penyusunan laporan ini kami sangat mengharapkan adanya masukan umpan balik yang akan berguna dalam proses perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar di masa mendatang. Masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan guna penyempurnaan di waktu yang akan datang.

Blitar, Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota Blitar



Dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.
Perbina Tk. I
NIP. 19680305 200112 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar sesuai dengan Rencana Strategis 2021-2026 adalah **“Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”**. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar menetapkan sasaran dalam Renstra tahun 2021-2026, **“Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”** dan **“Meningkatnya kinerja perangkat daerah”**.

Perumusan keberhasilan pencapaian kinerja jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan. Dinas Kesehatan Kota Blitar telah menetapkan 6 (lima) Indikator Kinerja Utama yang merupakan Indikator Sasaran dan 1 (satu) indikator Sasaran lainnya, untuk menjadi tanggung jawab organisasi dan harus dicapai setiap tahunnya selama periode Renstra.

Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 adalah:

1. Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Prevalensi Balita Stunting;
4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi;
6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar; dan
7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar;

Dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 ditetapkan 4 (empat) program upaya strategis dan 1 (satu) program pendukung/Administrasi Umum, meliputi:

Program Upaya Strategis:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program Pendukung (Administrasi Umum):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ditujukan untuk meningkatkan peran masing bidang, sekretariat dan sub bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam perumusan kebijakan Walikota demi meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kota Blitar, sehingga ke depan akan terwujud peningkatan derajat masyarakat Kota Blitar yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2022 oleh masing-masing bidang, sekretariat dan sub bagian dari dana APBD Kota Blitar. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang, sekretariat dan sub bagian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2022 dengan jumlah anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	:	Rp.	95.545.255.852,00
2. Belanja Modal	:	Rp.	5.984.566.976,00
Jumlah			101.529.822.828,00

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja **123,5%** atau "**sangat berhasil**".

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	170,46%
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	111,63%
	3. Prevalensi balita stunting	7,05%	5,26%	125,39%
	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%	34,62%	229,27%
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%	26,19%	58,2%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
	6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat	0,50 (skala)	0,35 (skala)	70%
Meningkatkan kinerja perangkat daerah	7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (86,61)	99,55
Rata-Rata Capaian Kinerja				123,5%

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **89,08%** dikategorikan "**berhasil**", masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Dasar Hukum	4
E. Aspek-aspek Strategis	5
F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	10
A. Rencana Strategis 2021-2026	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	15
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	17
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	22
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	24
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)	24
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)	26
1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan	37
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	38
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
C. Prestasi/Penghargaan	45
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Langkah Perbaikan	47

Lampiran-Lampiran

- A. Matriks Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2022	6
Tabel 1.2	Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2022	6
Tabel 1.3	Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2022	7
Tabel 1.4	Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2020-2022	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022	13
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022	17
Tabel 3.2	Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2022	19
Tabel 3.3	Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar Tahun 2021 – 2022	21
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2022	23
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	24
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur	25
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022	27
Tabel 3.8	Anggaran Belanja Langsung pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022	38
Tabel 3.9	Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022.....	39
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Anggaran	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kesehatan Kota Blitar mempunyai peran membantu Walikota Blitar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Blitar berperan strategis dalam mewujudkan visi Pembangunan Kota Blitar 2021-2026, yakni **“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”** dan pelaksanaan 5 (lima) misi pembangunan, khususnya misi ke-2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Blitar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dan alat bantu dalam upaya perbaikan Dinas Kesehatan Kota Blitar secara berkesinambungan di masa yang akan datang dalam rangka pemenuhan aspek akuntabilitas.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan. Dalam kedudukannya, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Dinas Kesehatan menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang didalamnya tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa *output*

dan *outcome* beserta target tahunan yang jelas. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- j. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- k. pengendalian penyakit, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan dan Rumah Tangga (PKRT), laboratorium kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- l. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
- m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;
- q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- r. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
- s. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- t. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- u. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
- v. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022, dengan tujuan:

1. mengetahui capaian kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022;
2. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk meningkatkan kinerjanya;
3. sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pemerintahan yang bersih (*clean government*), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek-Aspek Strategis

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Blitar sampai dengan Oktober 2022 adalah sebanyak 248 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	2
4.	Pejabat Fungsional	197
5.	Staf/Fungsional Umum	44

Tabel 1.2
Kekuatan SDM Dinas Kesehatan Kota Blitar berdasarkan Golongan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1	2	3
1.	Golongan IV	23
2.	Golongan III	164
3.	Golongan II	53
4.	Golongan I	1
5.	PTT	7

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Blitar memiliki sarana/prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional baik operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar maupun operasional UPT dibawahnya, yaitu UPT Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah.

- a. Kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kota Blitar dilaksanakan di:
Kantor utama yang terletak di Jalan Sudanco Supriyadi No. 61 Blitar.
- b. Adapun kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan di UPT Dinas Kesehatan yang terletak di:
 - 1) UPT Puskesmas Kepanjenkidul, Jalan Ciliwung No.178;
 - 2) UPT Puskesmas Sukorejo, Jalan Cemara No.163;
 - 3) UPT Puskesmas Sananwetan, Jalan Jawa No.07,
 - 4) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Jalan Ciliwung No.180;

Sedangkan jumlah sarana kesehatan lainnya menurut kepemilikan, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Kesehatan menurut Kepemilikan Tahun 2022

No.	Fasilitas Kesehatan	Pemilik/Pengelola			Jumlah
		Pemerintah Daerah	TNI/POLRI	Swasta	
1	2	3	4	5	6
1.	Rumah Sakit				
	Rumah Sakit Umum	1		4	5
	Rumah Sakit Khusus			1	1
2.	Puskesmas dan Jaringannya				
	Puskesmas Rawat Inap	0			0
	Puskesmas Non Rawat Inap	3			3
	Puskesmas Pembantu	17			17
3.	Sarana Pelayanan Lain				
	Balai pengobatan/klinik		2	24	26
	Praktik Dokter Umum Perorangan			33	33
	Praktik Dokter Gigi Perorangan			24	24
	Praktik Dokter Spesialis Perorangan			19	19
	Praktik Pengobatan Tradisional			13	13
	Unit Tranfusi Daerah	1			1
4.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian				
	Apotek	1		46	47
	Toko Obat			8	8

Sumber : Data Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kota Blitar cukup banyak dan tersebar merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

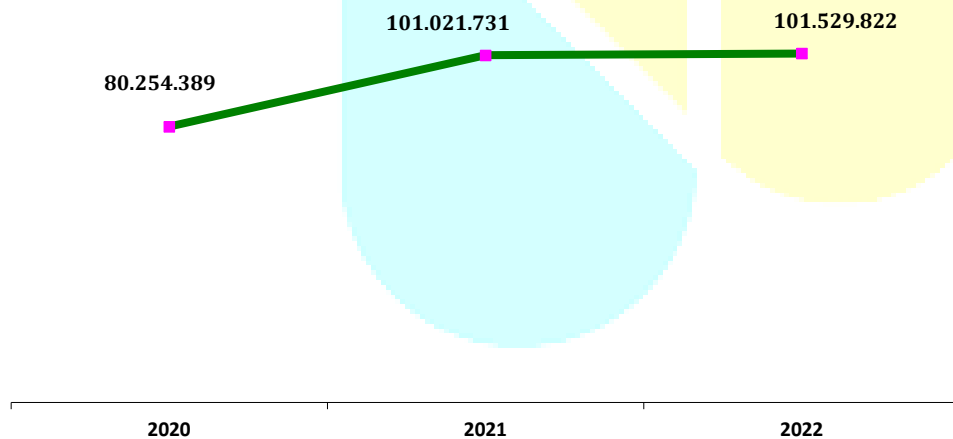
Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Renstra, yang berdasar APBD Pemerintah Kota Blitar, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Anggaran Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun 2020 - 2022

No.	Uraian	Jumlah Anggaran		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Belanja Daerah:			
	Dinas Kesehatan	63.441.515.567,92	91.977.390.357,00	92.942.335.842,00
	UPT PKM Kepanjenkidul	4.977.834.728,00	2.876.618.100,00	2.911.838.360,00
	UPT PKM Sukorejo	5.350.291.995,00	2.656.578.761,00	2.401.512.891,00
	UPT PKM Sananwetan	6.484.746.966,00	3.511.143.992,00	3.274.135.735,00
	Jumlah Anggaran	80.254.389.256,92	101.021.731.210,00	101.529.822.828,00

Dari tabel diatas perkembangan pembiayaan kesehatan pada Dinas kesehatan Kota Blitar untuk Pembiayaan Belanja langsung, dapat digambarkan dalam grafik berikut:

Grafik 1.1
Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2020-2022/000.



Anggaran yang tercantum dalam APBD Kota Blitar pada DPA Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas Kota Blitar bersumber dana dari DID (Dana Insentif Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK-Kes (Dana Alokasi Khusus Kesehatan), DAK Non-Fisik (Dana Alokasi Khusus Non Fisik), DBHPR (Dana Bagi Hasil Pajak Rokok), DBHCHT

(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), dan JKN-FKTP (Jaminan Kesehatan Nasional – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Adapun permasalahan yang dihadapi pada pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Masih ada kematian ibu sebanyak 17 orang;
2. Masih ada kematian bayi sebanyak 10 bayi;
3. Masih adanya balita stunting sebanyak 618 balita;
4. Belum tercapainya 100% Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terutama cakupan pelayanan kesehatan balita (29,19%), pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (36,86%) dan pelayanan kesehatan hipertensi (17,58%);
5. Masih rendahnya indeks keluarga sehat (0,28)

Beberapa Isu Strategis yang berdampak pada penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Blitar Tahun 2022, diantaranya:

1. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI);
2. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB);
3. Penurunan prevalensi balita stunting;
4. Peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peningkatan jumlah keluarga sehat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Blitar, Dinas Kesehatan Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun ke depan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Dinas Kesehatan Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah ***“Kota Blitar KEREN : Unggul, Makmur, Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender dan berkepribadian dalam kebudayaan;

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter;
3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan berbasis digital;
4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan;
5. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 secara terperinci sebagaimana dalam ***"Lampiran. 1 LKj IP 2022: Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021 – 2026"***.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-1 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Tahun 2022 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama.

KINERJA SASARAN 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan

- Angka Kematian Ibu (AKI) 583,33 per-100.000 kelahiran hidup
- Angka Kematian Bayi (AKB) 10,40 per-1.000 kelahiran hidup
- Prevalensi balita stunting 7,05 %
- Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 15,1 %
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi 45%
- IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar 0,50 (skala)

KINERJA SASARAN 2

Meningkatnya kinerja perangkat daerah
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

A

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, serta dalam mempertanggungjawabkan kinerja. Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 maka disajikan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan Bidang Kesehatan Masyarakat
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	Bidang Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan Pelayanan dan SDM Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Sekretariat	Laporan Sekretariat

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 ada 4 tingkatan yaitu:

1. Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota Blitar;
2. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dan;
3. Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Sub Koordinator;
4. Perjanjian kinerja antara pelaksana dengan Sub Koordinator.

Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam **"Lampiran 3 LKjIP 2022"**.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran 2 LKjIP 2022"**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah.

A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah yang didukung dengan program dan kegiatan. Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Kota Blitar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2022.

Pengukuran Capaian Kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun 2022, serta membandingkan dengan target nasional. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

1. **Rumus 1:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. **Rumus 2:** Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing- masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	2	3	4
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Kesehatan Kota Blitar guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja
Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33per-100.000 kelahiran hidup	172,31per-100.000 kelahiran hidup	170,46
	2. Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	111,63
	3. Prevalensi balita stunting	7,05%	5,26%	125,39
	4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%	34,62	229,27
	5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%	26,19%	58,2
	6. IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,50 (skala)	0,35 (skala)	70
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (86,61)	99,55

Sasaran 1 “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan”, merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat, yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Angka Kematian Ibu adalah banyaknya wanita meninggal dari suatu penyebab kematian terkait gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus kecelakaan atau insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan usia kehamilan per-100.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kasus kematian ibu terkait kehamilan, persalinan dan masa nifas Kota Blitar tahun 2022 sebanyak 3 kasus dengan jumlah kelahiran hidup di tahun yang sama sebanyak 1.741 kelahiran hidup. Maka AKI Kota Blitar tahun 2022 sebesar 172,31 per-100.000 kelahiran hidup telah memenuhi target daerah sebesar 583,33 per 100.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 170,46%.

Kematian ibu disebabkan oleh pre-eklamsia 2 kasus dan 1 kasus karena henti jantung akibat lainnya. Kematian oleh karena pre-eklamsia dikarenakan dalam masa kehamilan, ibu disertai penyakit penyerta berupa hipertensi. Sedangkan penyebab kematian ibu karena henti jantung akibat lainnya diperkirakan sebagai kejadian lanjutan terhadap kondisi ibu saat hamil sebagai kehamilan beresiko yang memiliki riwayat kehamilan lebih dari 3 kali dan usia ibu hamil lebih dari 35 tahun termasuk dalam kategori ibu hamil risiko tinggi.

Kehamilan berisiko karena usia kehamilan dan penyakit penyerta pada ibu hamil menjadi faktor risiko. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian ibu Kota Blitar adalah early deteksi melalui ANC terpadu dan mengoptimalkan ANC yang semula 4 kali menjadi 6 kali selama masa kehamilan.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyak kematian bayi usi 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada waktu dan wilayah tertentu.

Jumlah kematian bayi Kota Blitar tahun 2022 sebanyak 16 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 1.741. Maka AKB Kota Blitar tahun 2022 sebesar 9,19 per-

1.000 kelahiran hidup dari target daerah sebesar 10,40 per-1.000 kelahiran hidup, dengan tingkat capaian 111,63%.

Kasus kematian bayi di Kota Blitar disebabkan karena asfiksia sebanyak 6 dan 10 kasus karena sebab lainnya, antara lain gagal nafas, syok septik, syok distributif, dan BBLR (berat badan lahir rendah).

Status gizi dan penyakit penyerta ibu hamil dapat menjadi faktor risiko kematian pada bayi. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan angka kematian bayi Kota Blitar adalah skrining faktor penyulit dari penyakit penyerta ibu hamil yang membawa dampak pada kehamilan dan persalinan, meningkatkan capaian ANC terpadu, dan skrining status gizi ibu hamil (anemia, LILA).

3. Prevalensi balita stunting

Prevalensi balita stunting dengan formula indikator jumlah balita stunting dibagi jumlah seluruh balita dikalikan 100%. Dalam capaian prevalensi balita stunting ini mengikuti hasil perhitungan dari Kementerian Kesehatan RI untuk dipublikasikan. Indikator tersebut tercapai 125,39% atau termasuk dalam kategori **“sangat berhasil”** yang berasal dari perhitungan target 7,05% dengan realisasi 5,26%.

Tabel 3.2 Data Balita Stunting Kota Blitar Tahun 2022

NO	NAMA PUSKESMAS	SASARAN (S)	BALITA DITIMBANG (D)	SANGAT PENDEK	PENDEK	STUNTING	%
1	UPT PUSKESMAS SUKOREJO	2785	2488	34	126	160	6,43
2	UPT PUSKESMAS KEPANJENKIDUL	3015	1863	5	26	31	1,66
3	UPT PUSKESMAS SANANWETAN	3921	3070	32	167	199	6,48
	JUMLAH	9721	7421	71	319	390	5,26

Menurut UNICEF (1998), pertumbuhan dipengaruhi oleh sebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung diantaranya adalah asupan makanan dan keadaan kesehatan, sedangkan penyebab tidak langsung meliputi ketersediaan dan pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Faktor-faktor tersebut ditentukan oleh sumber daya manusia, ekonomi dan organisasi melalui faktor pendidikan. Penyebab paling mendasar dari tumbuh kembang adalah masalah struktur politik, ideologi, dan sosial ekonomi yang dilandasi oleh potensi sumber daya yang ada (Supariasa et al., 2012).

Status gizi ibu hamil sebagai risiko kelahiran bayi dengan kondisi stunting. Sebagai upaya tindak lanjut untuk menurunkan prevalensi balita stunting Kota Blitar adalah penguatan data anemia dan LILA ibu hamil, swiping yang melibatkan PKK, Dasawisma, Darma Wanita utk menjanging ibu hamil terkait anemia dan LILA < 23,5 cm, dan skrining catin layak hamil.

4. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah perhitungan jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%. Kunjungan ini terdiri dari kunjungan baru pasien sakit dan sehat yang dihitung dalam tahun yang sama.

Jumlah kunjungan baru di fasilitas pelayanan kesehatan baik dalam dan luar gedung sebanyak 54.892 orang terhadap 158.558 orang penduduk Kota Blitar. Jadi cakupan pelayanan kesehatan masyarakat adalah sebesar 34,62% dari target 15,1%.

Capaian kinerja indikator tersebut sudah sangat tinggi, sehingga dalam upaya pencapaian kinerja renstra Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026, maka pada perencanaan tahun 2023 akan diupayakan perubahan target kinerja tahun 2025 dimajukan untuk tahun 2023.

5. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dalam pelayanan harus mengedepankan kualitas mutu pelayanan bagi masyarakat dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan sesuai standar bagi masyarakat. Standar mutu pelayanan fasilitas kesehatan dinilai melalui penilaian akreditasi fasyankes.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Fasilitas Kesehatan, yang dilakukan oleh lembaga independen yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pembinaan dan penilaian akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Blitar dilaksanakan pada 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 26 Klinik, dan 7 Laboratorium Kesehatan. Adapun capaian persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi sebesar 26,19% terdiri dari 6 Rumah Sakit, 3 Puskesmas, 1 Klinik, dan 1

Laboratorium Kesehatan yang sudah memiliki sertifikat akreditasi. Capaian tersebut masih belum mencapai target indikator sebesar 45%.

Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi akan dilaksanakan penilaiannya setelah terbit juknis terkait pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tindak lanjut upaya penilaian mutu pelayanan kesehatan pasca pandemi.

Peraturan terkait juknis akreditasi fasyankes selain RS belum terbit menjadi kendala pencapaian target kinerja. Sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi adalah pembinaan fasyankes untuk persiapan akreditasi untuk tahun 2023 dan seterusnya, pengoptimalan sarana dan prasarana fasyankes.

6. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar

Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan data per-31 Desember 2022 sebesar 0,35 masih kurang dari target daerah 0,50, yaitu dengan capaian 70% termasuk dalam kategori “**berhasil**”. Kota Blitar termasuk dalam kategori “**keluarga tidak sehat**” dengan perhitungan jumlah keluarga sehat dibanding jumlah seluruh keluarga di Kota Blitar. Adapun nilai untuk masing-masing indikator Keluarga Sehat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Blitar
Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)	
		2021	2022
1.	Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)	44,83	54,49
2.	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	98,14	99,10
3.	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	98,26	99,28
4.	Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	88,02	91,12
5.	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	96,25	97,51
6.	Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	36,02	44,02
7.	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	27,81	37,23
8.	Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan	36,88	60,00

No.	Indikator Keluarga Sehat	Capaian (%)	
		2021	2022
9.	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	56,44	59,98
10.	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional (JKN)	57,12	65,52
11.	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	98,43	98,98
12.	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat	98,22	98,63
Indeks Keluarga Sehat Kota Blitar		0,28	0,35

Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar tahun 2022 naik dari capaian tahun 2021 sebesar 0,07.

Dari tabel di atas, permasalahan pada capaian IKS adalah Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur sebesar 37,23%; Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 44,02%; Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 54,83%; Anggota keluarga tidak ada yang merokok 59,98%; dan Penderita gangguan jiwa mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan 60%.

Dalam pelaksanaan survei IKS Kota Blitar mengalami beberapa kendala antara lain intervensi terhadap permasalahan pada hasil survei tahun sebelumnya masih menyesuaikan dengan kondisi pasca pandemi covid-19, data IKS tidak sinkron dengan data kinerja, dan fitur aplikasi PIS-PK yang mengalami beberapa perubahan sebagai upaya perbaikan.

Data PIS-PK diharapkan menjadi gambaran secara menyeluruh kondisi kesehatan masyarakat tiap individu Kota Blitar dengan target sasaran seluruh penduduk Kota Blitar, sehingga dapat digunakan sebagai data awal untuk intervensi awal dan lanjutan dalam penentuan kebijakan kesehatan. Pelaksanaan intervensi terhadap keluarga dengan kriteria yang belum memenuhi syarat adalah upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan IKS Kota Blitar.

Sasaran 2 “Meningkatnya kinerja perangkat daerah”, merupakan indikator penunjang administrasi perangkat daerah, yaitu:

7. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas

keuangan. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 adalah 86,61 termasuk dalam kategori A dari target A (87) maka capaiannya sebesar 99,55%.

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kota Blitar adalah:

1. Melakukan monitoring terhadap target kinerja jangka menengah Renstra PD.
2. Melakukan reuiu Renstra secara berkala.
3. Meningkatkan kepedulian dan komitmen setiap pegawai dalam pengukuran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dan SKP.
4. Keterlibatan aktif setiap pegawai baik dari pimpinan maupun sampai staf dalam pemahaman proses perencanaan samapai evaluasi kinerja.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021-2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	5	6	8	9	11	12
1.	<i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>	AHH (Angka Harapan Hidup)	74,65	73,95	73,86	74,26	98,94	100,42
A.	<i>Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan</i>	Angka Kematian Ibu (AKI)	94,50 per-100.000 kelahiran hidup	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	889,59 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	(-650)	170,46
		Angka Kematian Bayi (AKB)	8,08 per-1.000 kelahiran hidup	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	5,23 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	135,27	111,63
		Prevalensi balita stunting	10%	7,05%	7,25%	5,26%	127,5	125,39
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	NA	15,1%	NA	34,62%	NA	229,27

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	NA	45%	NA	26,19%	NA	58,2
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	0,71 (skala)	0,50 (skala)	0,28 (skala)	0,35 (skala)	39,44	70
2.	Meningkatnya tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP Dina Kesehatan Kota Blitar	NA	A (87)	A	A (86,61)	NA	99,55
B.	<i>Meningkatnya kinerja perangkat daerah</i>	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	NA	A (87)	A	A (86,61)	NA	99,55

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 terhadap target periode akhir Rencana Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	74,30	74,26	99,95
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	208,33 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	117,29
	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,51 per-100.000 kelahiran hidup	9,19 per-100.000 kelahiran hidup	92
	Prevalensi balita stunting	6,80%	5,26%	122,65

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi s/d 2022	Tingkat Kemajuan
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,50%	34,62%	229,27
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terakreditasi	75%	26,19%	34,92
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,85 (skala)	0,35 (skala)	41,18
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87,30)	A (86,61)	99,21

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur (Target SPM)

Indikator pada Tujuan Renstra Dinas Kesehatan merupakan Indikator Derajat Kesehatan, data capaian yang diperoleh merupakan data tahun 2022. Dalam rangka pencapaian target renstra, Dinas Kesehatan didukung oleh pencapaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Adapun perbandingan realisasi kinerja SPM Dinas Kesehatan Kota Blitar dengan realisasi Provinsi Jawa Timur ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 dengan Realisasi Provinsi Jawa Timur

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Realisasi Daerah Tahun 2022	Ket.
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	92,39%	85,73%	-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	97,67%	81,92%	-

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Realisasi Daerah Tahun 2022	Ket.
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95,77%	81,16%	-
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	93,33%	58,81%	-
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,21%	99,16%	+
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	78,68%	101,22%	+
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,43%	93,48%	+
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,28%	79,69%	-
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,17%	104,41%	+
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	93,37%	87,5%	-
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	92,34%	93,87%	+
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan	86,36%	118,63%	+

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Tahun 2022	Realisasi Daerah Tahun 2022	Ket.
	Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			

Keterangan : + realisasi daerah lebih besar dari realisasi provinsi
- realisasi daerah lebih kecil dari realisasi provinsi

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup untuk penyelenggaraan layanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga) UPT Puskesmas, yaitu UPT Puskesmas Kepanjenkidul, UPT Puskesmas Sukorejo dan UPT Puskesmas Sananwetan. Pada tahun 2022 jumlah anggaran adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi	: Rp.	95.545.255.852,00
2. Belanja Modal	: Rp.	5.984.566.976,00
Belanja Daerah	: Rp.	101.529.822.828,00

Dari anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 101.529.822.828,00 sampai dengan bulan Desember 2022 telah terealisasi sebesar Rp. 90.440.891.568,66 (89,08%). Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
Dinas Kesehatan		92.942.335.842,00	82.816.421.898,66	89,11
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	61.521.829.849,00	53.446.745.190,77	86,87
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.657.600.057,00	7.508.095.255,36	77,74
	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.850.000.000,00	2.331.939.244,00	81,82
	2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.818.738.540,00	2.507.456.436,00	88,96

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
3.	Pengadaan Obat, Vaksin	988.263.614,00	691.035.323,00	69,92
4.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.592.502.487,00	1.601.761.502,36	61,78
5.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	350.700.416,00	347.739.750,00	99,16
6.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	57.395.000,00	28.163.000,00	49,07
b.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.790.939.592,00	45.865.887.335,41	88,56
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	161.161.400,00	156.937.100,00	97,38
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	144.134.600,00	135.142.600,00	93,76
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.973.200,00	14.454.000,00	40,18
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	50.071.000,00	50.071.000,00	100
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	147.925.000,00	147.925.000,00	100
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	162.056.440,00	157.836.440,00	97,40
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	178.883.700,00	178.883.700,00	100
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.709.900,00	46.709.900,00	100
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.303.800,00	4.303.800,00	100
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	139.128.400,00	137.487.400,00	98,82
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	127.635.400,00	121.431.900,00	95,14
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	236.449.400,00	235.214.600,00	99,48
13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	166.584.750,00	158.999.279,00	95,45
15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.295.518.440,00	909.185.063,00	39,61
16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	262.122.600,00	246.253.900,00	93,95
17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	31.666.600,00	28.678.600,00	90,56
18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	118.933.000,00	117.578.600,00	98,86
19.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	190.649.900,00	179.761.300,00	94,29
20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	14.328.800,00	13.387.800,00	93,43
21.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	663.188.200,00	544.306.530,00	82,07
22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.536.500,00	4.536.500,00	100
23.	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	40.079.400,00	40.079.400,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	429.599.300,00	412.854.134,00	96,10
	25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	33.654.945.062,00	30.327.851.294,00	90,11
	26. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.041.300.000,00	761.852.900,00	73,16
	27. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	373.760.300,00	372.288.800,00	99,61
	28. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	106.350.000,00	94.797.000,00	89,14
	29. Operasional Pelayanan Puskesmas	8.412.875.400,00	8.160.972.245,41	97,01
	30. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.050.845.400,00	1.621.215.095,00	79,05
	31. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	67.363.400,00	67.063.200,00	99,55
	32. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	245.603.100,00	240.113.400,00	97,76
	33. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	89.083.600,00	88.850.400,00	99,74
	34. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	69.568.600,00	61.414.905,00	88,28
	35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	27.605.000,00	27.449.550,00	99,44
	c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	67.527.600,00	67.000.000,00	99,22
	1. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	67.527.600,00	67.000.000,00	99,22
	d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.762.600,00	5.762.600,00	100
	1. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5.762.600,00	5.762.600,00	100
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	280.317.203,00	274.880.100,00	98,06
	a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	67.444.903,00	65.207.800,00	96,68
	1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	67.444.903,00	65.207.800,00	96,68
	b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	90.672.300,00	90.672.300,00	100
	1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90.672.300,00	90.672.300,00	100
	c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.200.000,00	119.000.000,00	97,38
	1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	122.200.000,00	119.000.000,00	97,38
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	385.821.700,00	344.846.593,00	89,38
	a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	113.474.800,00	103.474.800,00	91,19

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	113.474.800,00	103.474.800,00	91,19
	b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	28.398.800,00	28.246.800,00	99,46
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	28.398.800,00	28.246.800,00	99,46
	c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000,00	113.955.900,00	93,88
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000,00	113.955.900,00	93,88
	d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2.745.500,00	2.745.500,00	100
	1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2.745.500,00	2.745.500,00	100
	e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	119.812.600,00	96.423.593,00	80,48
	1. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	119.812.600,00	96.423.593,00	80,48
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.352.834.500,00	2.406.311.060,00	71,77
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.369.940.700,00	2.367.302.460,00	99,89
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.369.940.700,00	2.367.302.460,00	99,89
	b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	943.885.200,00	0,00	0,00
	1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	943.885.200,00	0,00	0,00
	c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	39.008.600,00	39.008.600,00	100
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	39.008.600,00	39.008.600,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	
	(UKBM)			
V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.401.532.590,00	26.343.638.954,89	96,14
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.355.900,00	87.606.700,00	92,85
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.260.000,00	43.725.400,00	94,52
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.095.900,00	37.419.300,00	98,22
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	6.462.000,00	64,62
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.950.904.707,00	23.039.892.554,00	96,20
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.938.664.707,00	23.027.652.554,00	96,19
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.240.000,00	12.240.000,00	100
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.930.100,00	76.299.000,00	92,00
	1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.360.800,00	13.360.800,00	100
	2. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69.569.300,00	62.938.200,00	90,47
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.345.400,00	699.164.542,00	94,82
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.063.400,00	38.063.400,00	100
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.363.500,00	14.363.500,00	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.621.600,00	86.152.000,00	94,03
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.302.400,00	58.302.400,00	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000,00	7.020.000,00	97,50
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	527.794.500,00	495.263.242,00	93,84
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.866.900,00	77.393.700,00	73,10
	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.866.900,00	77.393.700,00	73,10
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.054.307.683,00	2.027.609.311,89	89,70
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	244.607.400,00	220.383.031,00	90,10
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.809.700.283,00	1.807.226.280,89	99,86
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.821.900,00	335.673.147,00	89,32
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.676.700,00	187.683.947,00	82,43
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.036.400,00	43.036.400,00	100
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.108.800,00	104.952.800,00	99,85
	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	2.911.838.360,00	2.685.599.424,00	92,23
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.851.059.660,00	290.139.726,00	99,97
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	290.217.000,00	2.631.909.524,00	92,31

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	Kabupaten/Kota			
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	111.208.800,00	111.143.429,00	99,94
	3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	176.008.200,00	175.996.297,00	99,99
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.560.842.660,00	2.341.769.798,00	91,45
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51.006.700,00	50.913.800,00	99,82
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.139.400,00	7.061.500,00	98,91
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.250.000,00	2.250.000,00	100
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	8.261.000,00	7.952.300,00	96,26
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.534.200,00	12.564.000,00	92,83
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	91.669.500,00	89.486.400,00	97,62
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	24.315.000,00	24.213.000,00	99,58
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3.442.800,00	3.442.800,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.442.800,00	3.442.800,00	100
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	71.278.900,00	68.895.400,00	96,66
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	107.623.200,00	105.909.550,00	98,41
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	57.625.700,00	52.634.800,00	91,34
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	28.160.000,00	28.160.000,00	100
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90.248.300,00	89.907.700,00	99,62
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.297.700,00	22.881.700,00	87,01
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	700.000,00	700.000,00	100
	17. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	75.968.100,00	75.667.000,00	99,60
	18. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	355.784.200,00	235.060.700,00	66,07
	19. Operasional Pelayanan Puskesmas	1.520.494.660,00	1.442.061.048,00	94,84
	20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	21.600.500,00	18.565.300,00	85,95
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	60.778.700,00	53.689.900,00	88,34
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.778.700,00	53.689.900,00	88,34
	1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	60.778.700,00	53.689.900,00	88,34
UPT Puskesmas Sukorejo		2.401.512.891,00	2.103.056.535,00	97,57

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.231.224.291,00	1.935.803.935,00	86,76
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	355.766.711,00	252.668.253,00	71,02
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	84.154.440,00	76.779.540,00	91,24
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	95.291.546,00	77.930.903,00	81,78
	3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	176.320.725,00	97.957.810,00	55,56
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.875.457.580,00	1.683.135.682,00	89,75
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	61.604.100,00	59.534.100,00	96,64
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.006.000,00	8.006.000,00	100,00
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	44.729.000,00	44.729.000,00	100,00
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	336.774.400,00	334.591.400,00	99,35
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	69.204.900,00	69.204.900,00	100,00
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	195.435.900,00	190.764.140,00	97,61
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	89.259.500,00	89.258.000,00	100,00
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.406.000,00	5.406.000,00	100,00
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9.882.000,00	9.658.000,00	97,73
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	153.807.500,00	131.808.550,00	85,70
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	78.528.500,00	60.835.100,00	77,47
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.397.600,00	49.768.586,00	98,75
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	73.054.480,00	66.704.000,00	91,31
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	179.943.000,00	179.943.000,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	33.699.000,00	33.084.100,00	98,18
	16. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	137.468.055,00	103.108.000,00	75,01
	17. Operasional Pelayanan Puskesmas	348.257.645,00	246.732.806,00	70,85
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	170.288.600,00	167.252.600,00	98,22
	a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.814.600,00	147.778.600,00	97,99
	1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	150.814.600,00	147.778.600,00	97,99
	b. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.474.000,00	19.474.000,00	100

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
	1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	19.474.000,00	19.474.000,00	100
UPT Puskesmas Sananwetan		3.274.135.735,00	2.919.669.411,00	89,17
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.136.426.735,00	2.789.203.011,00	88,93
	a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	484.999.948,00	424.332.625,00	87,49
	1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	69.314.100,00	59.882.600,00	86,39
	2. Pengadaan Obat, Vaksin	99.999.948,00	93.709.902,00	93,71
	3. Pengadaan Bahan Habis Pakai	315.685.900,00	270.740.123,00	85,76
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.651.426.787,00	2.364.870.386,00	89,19
	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	80.747.300,00	73.424.900,00	90,93
	2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.040.800,00	9.040.600,00	100
	3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	23.406.600,00	22.901.400,00	97,84
	4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	463.165.700,00	445.577.500,00	96,20
	5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	79.738.700,00	68.751.600,00	86,22
	6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	101.708.212,00	85.462.912,00	84,03
	7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	111.166.300,00	110.592.300,00	99,48
	8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.650.000,00	46.650.000,00	100
	9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	50.663.800,00	38.320.128,00	75,64
	10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	45.423.600,00	43.763.400,00	96,35
	11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	169.040.800,00	166.331.533,00	98,40
	12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	46.516.100,00	46.508.600,00	99,98
	13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	53.707.900,00	53.707.900,00	100
	14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100
	15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	36.489.400,00	32.382.200,00	88,74
	16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.141.600,00	10.141.600,00	100
	17. Pengelolaan Surveilans Kesehatan	139.714.800,00	99.547.740,00	71,25
	18. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	130.299.100,00	109.687.450,00	84,18
	19. Operasional Pelayanan Puskesmas	1.024.446.075,00	872.778.623,00	85,20
	20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	14.360.000,00	14.300.000,00	99,58
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	137.709.000,00	130.466.400,00	94,74

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1		2	3	4
a.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	137.709.000,00	130.466.400,00	94,74
1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	137.709.000,00	130.466.400,00	94,74
JUMLAH TOTAL DINAS KESEHATAN		101.529.822.828,00	90.440.891.568,66	89,08

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 90.440.891.568,66** dari total anggaran sebesar **Rp. 101.529.822.828,00** atau sebesar **89,08%**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2022 termasuk **"berhasil"**.

Secara umum kinerja keuangan per-program sudah baik, ada beberapa aktivitas kegiatan yang tidak terealisasi pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya merupakan dana pelimpahan bersumber dana BOK DAK Non-Fisik, yang mana pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin dan BMHP dari Dinkes ke Puskesmas.
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana tidak dapat direalisasikan seluruhnya (39,61%) karena anggaran berupa biaya operasional Rumah Isolasi bagi pasien covid-19 Kota Blitar, yang dalam tahun 2022 hanya beroperasi selama 3 bulan dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah kasus dan upaya penanganan pasien covid-19 sudah dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Blitar. Anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus berdasarkan kondisi pandemi covid-19 sebelumnya.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat karena berkenaan dengan hasil desk kegiatan DAK Non-Fisik dengan Kementerian Kesehatan tidak disetujui sebesar Rp. 943.885.200,00.

Sedangkan capaian Kinerja Program, sebagai berikut:

Program Kewenangan Wajib Bidang Kesehatan:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket.
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	85,73%	85,73	
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	91,92%	91,92	
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	81,16%	81,16	
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	58,81%	58,81	Pengumpulan data pada usia pra sekolah belum optimal, sehingga perlu kerjasama dengan PAUD/RA
Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,16%	99,16	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	101,22%	101,22	
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	93,48%	93,48	
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	79,69%	79,69	
Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	104,41%	104,41	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	87,5%	87,5	
Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	93,87%	93,87	
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	118,63%	118,63	
Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100	

Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,2%	38,09%	40,01	Cakupan berdasarkan domisili, sedangkan beberapa penduduk kota berdomisili di luar kota sehingga perlu mengoptimalkan penjangkaran sasaran di wilayah kerja, melibatkan lintas sektor dan fasyankes lainnya
Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100	
Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	60%	59,23%	98,72	
Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	25%	22%	88	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100	

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%
Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	83%	75,38%	90,82%

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	57,14%	85,71%	150%

Program Non Urusan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	80,5%	97,16%

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui prosentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Anggaran Belanja Daerah pada Sasaran Strategis Dibandingkan Dengan Keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	522.840.300,00	0,51
		Angka Kematian Balita (AKB)	106.358.800,00	0,1
		Prevalensi Balita Stunting	1.405.586.000,00	1,38
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	54.641.775.319,00	53,82
		Presentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	13.730.119.019,00	13,52
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	3.721.610.800,00	3,67
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kota Blitar	27.401.532.590,00	26,99
Jumlah			101.529.822.828,00	100

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
A. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	170,46%	2.390.393.900,00	500.060.600,00	95,64%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	85,73%	85,73%	2.390.393.900,00	500.060.600,00	95,64%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	81,92%	81,92%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	111,63%	106.358.800,00	84.334.400,00	79,29%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	81,16%	81,16%	106.358.800,00	84.334.400,00	79,29%
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Prevalensi balita stunting	7,05%	5,26%	125,39%	1.405.586.000,00	1.369.296.800,00	97,42%

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%	58,81%	58,81%	1.405.586.000,00	1.369.296.800,00	97,42%
	Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%	34,62%	229,27%	54.641.775.319,00	48.538.890.401,41	88,83%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	99,16%	99,16%	54.641.775.319,00	48.538.890.401,41	88,83%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	101,22%	101,22%			
	Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	93,48%	93,48%			
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	79,69%	79,69%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%	104,41%	104,41%			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%	87,5%	87,5%			
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%	93,87%	93,87%			
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%	118,63%	118,63%			
	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%	100%	100%			
	Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,2%	38,09%	40,01%			
	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%	100%	100%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
	Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	60%	59,23%	98,72%			
	Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	25%	22%	88%			
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi kesehatan	45%	26,19%	58,2%	13.730.119.019,00	10.930.806.152,36	79,61%
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	13.063.980.116,00	10.311.079.459,36	78,93%
2. Program Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	100%	100%	280.317.203,00	274.880.100,00	98,06%
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	100%	100%	385.821.700,00	344.846.593,00	89,38%
	Persentase tempat pengelolaan makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan	83%	75,38%	90,82%			

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,50	0,35	70%	3.721.610.800,00	2.757.719.960,00	74,10%
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	57,14%	85,71%	150%	3.721.610.800,00	2.757.719.960,00	74,10%
B. Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (86,61)	99,55%	27.401.532.590,00	26.259.783.254,89	95,83%
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	80,5	97,16%	27.401.532.590,00	26.259.783.254,89	95,83%
Total					101.529.822.828,00	90.440.891.568,66	89,08

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi	Ket.
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	170,46	95,64	1,78	Efisien
		Angka Kematian Bayi (AKB)	111,63	79,29	1,41	Efisien
		Prevalensi balita stunting	125,39	97,42	1,29	Efisien
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	229,27	88,83	2,58	Efisien
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	58,2	79,61	0,73	Tidak Efisien
		Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar	70	74,10	0,94	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	99,55	95,83	1,04	Efisien

Tingkat efisien capaian kinerja terhadap penyerapan anggaran Dinas Kesehatan Kota Blitar tahun 2022 masih ada dua indikator kinerja sasaran yang tidak efisien, antara lain:

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi, tingkat efisiensi sebesar 0,73. Hal tersebut dikarenakan juknis terkait penilaian akreditasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama belum terbit dari pusat. Kebijakan penilaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan setelah kondisi pandemi

covid-19 dinyatakan selesai oleh pemerintah. Peraturan terkait juknis akreditasi fasyankes selain RS belum terbit menjadi kendala pencapaian target kinerja. Sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi adalah pembinaan fasyankes untuk persiapan akreditasi untuk tahun 2023 dan seterusnya, pengoptimalan sarana dan prasarana fasyankes.

2. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Blitar, tingkat efisiensi sebesar 0,41. Hal tersebut dikarenakan capaian kinerja IKS Kota Blitar lebih rendah dari pada target yang ditetapkan. Walaupun demikian, capaian IKS Kota Blitar tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Maka, penyerapan anggaran sebagai upaya peningkatan IKS Kota Blitar cukup berhasil dalam upaya peningkatan capaian IKS Kota Blitar. Pelaksanaan intervensi terhadap keluarga dengan kriteria yang belum memenuhi syarat adalah upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan IKS Kota Blitar.

C. Prestasi/Penghargaan

Pada Tahun 2022, ada 4 (empat) penghargaan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Blitar yaitu:

1. Penghargaan Keberhasilan atas pencapaian target Non-Polio AFP dan Discardes (bukan campak-bukan rubela) Tahun 2022.
2. Penghargaan Terbaik 2 Penilaian SAKIP Kota Blitar Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kota Blitar. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	170,46%
	Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	111,63%
	Prevalensi balita stunting	7,05%	5,26%	125,39%
	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%	34,62%	229,27%
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%	26,19%	58,2%
	IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat	0,50	0,35	70%
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (86,61)	99,55%
Rata-rata capaian kinerja				123,5%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Blitar

tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai rata-rata capaian kinerja 123,5% atau "*sangat berhasil*".

Akuntabilitas kinerja tinggi dengan 6 (enam) dari 7 (tujuh) indikator sasaran mencapai target. Adapun 3 (tiga) indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu (1) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi masih belum mencapai target karena pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan RI belum menerbitkan juknis penilaian akreditasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga pada tahun bersangkutan hanya dilaksanakan pembinaan dalam rangka persiapan penilaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; (2) IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Sehat karena masih ada indikator IKS yang belum tercapai yaitu Indikator KB, TBC, hipertensi, ODGJ, dan merokok masih rendah sehingga perlu peningkatan intervensi; dan (3) Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar.

Sedangkan akuntabilitas keuangan/kinerja keuangan sebesar **89,08%** dikategorikan "*berhasil*", seperti pada tabel di bawah ini, masih dijumpai beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya.

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan						
Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	170,46%	2.390.393.900,00	500.060.600,00	95,64%
Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	111,63%	106.358.800,00	84.334.400,00	79,29%
Prevalensi balita stunting	7,05%	5,26%	125,39%	1.405.586.000,00	1.369.296.800,00	97,42%
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%	34,62%	229,27%	54.641.775.319,00	48.538.890.401,41	88,83%
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%	26,19%	58,2%	13.730.119.019,00	10.930.806.152,36	79,61%
IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,50	0,35	70%	3.721.610.800,00	2.757.719.960,00	74,10%

Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya kinerja perangkat daerah						
Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	A (86,61)	99,55%	27.401.532.590,00	26.259.783.254,89	95,83%
Total				101.529.822.828,00	90.440.891.568,66	89,08

B. Langkah Perbaikan

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar upaya yang harus dilakukan:

1. Optimalisasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagaimana Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- 2.
3. Optimalisasi Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.
4. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan primer mendasarkan pada Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
5. Peningkatan upaya preventif dan promotif untuk mencapai perilaku masyarakat hidup sehat.
6. Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, lembaga swadaya masyarakat peduli kesehatan, organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan swasta dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2022 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tulus dan ikhlas bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka

mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.



dr. BHARMA SETIAWAN, M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19600305 200112 1 003

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan sumber daya manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2022				2020	2022			
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	73,75 tahun	73,95 tahun	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah Kematian Ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali Konstanta (100.000) bayi lahir hidup	189,13 per-100.000 kelahiran hidup	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan b. peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan c. peningkatan kunjungan K1 dan K4 	
						Angka kematian Bayi (AKB)	Jumlah Kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran Hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	11,82 per-1.000 kelahiran hidup	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) b. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) c. Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) d. peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang 	
						Prevalensi balita stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	7,25%	7,05%	Peningkatan penanganan stunting	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan gizi ibu hamil b. Peningkatan gizi balita 	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2022				2020	2022			
						Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	NA	15,10%	Peningkatan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan b. Peningkatan sistem pelayanan rujukan c. Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit d. Peningkatan layanan kegawatdaruratan e. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan f. Pengembangan layanan home care 	
										Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	<ul style="list-style-type: none"> a. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular b. Peningkatan pengetahuan tentang PHBS 	
						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	45%	45%	Peningkatan akreditasi fasyankes	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pembinaan akreditasi fasyankes b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 	
						IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,24	0,50	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan	Peningkatan jaminan akses pelayanan kesehatan melalui program-program kesehatan di fasilitas pelayanan	

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
			2020	2022				2020	2022			
Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A	A (87)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A	A (87)	Peningkatan kinerja perangkat daerah	a. Peningkatan sarana prasarana perkantoran b. Peningkatan koordinasi antar bidang dan lintas sektor	

Blitar, 3 Februari 2023



DHARMA SETIawan, M.MKes.

NIP. 196803052001121003

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu hamil yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah laporan supervisi fasilitatif yang tersusun	2 laporan	339.147.000,00
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kesehatan ibu yang tersusun	2 laporan monev	
											Jumlah peserta bimbingan teknis kesehatan keluarga	50 orang nakes	
		Angka kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	100%	Persentase standar baku pelayanan kesehatan ibu bersalin yang terlaksana	100%	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapatkan pendampingan pelayanan kesehatan	250 ibu hamil	168.320.800,00
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan ibu bersalin	2 laporan	
											Jumlah laporan hasil kajian Audit Maternal Perinatal (AMP)	4 laporan	
Angka kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100%	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	Persentase standar baku pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapat pelayanan Skrining Hipotiroid Konginetal	200 bayi baru lahir	106.358.800,00		
									Jumlah laporan hasil kajian Audit Maternal Perinatal (AMP)	4 laporan			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prevalensi balita stunting	7,05%		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan balita yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang terlayani SDIDTK (Stimulasi Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang)	150 orang	858.272.100,00
											Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan Pelayanan kesehatan balita yang tersusun	2 laporan	
					Persentase ibu, bayi, balita dengan masalah gizi yang mendapatkan perawatan	100%		Jumlah fasilitasi intervensi Gizi sensitif	3 fasilitasi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta Orientasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak)	30 orang	547.313.900,00
								Persentase konselor/kader PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak) yang terlatih	14,3%		Jumlah laporan hasil monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Stunting di Kota Blitar	2 laporan	
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan gizi masyarakat	4 laporan	
											Jumlah Balita di Lembaga PAUD dan TK/RA yang diberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	7.000 anak	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Sekretaris Tetap Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Blitar	2 laporan	310.402.800,00
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Skrining Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar	1 laporan	
											Jumlah peserta pembinaan Posyandu Remaja	40 orang	
											Jumlah Remaja pada Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang dibina	150 orang	
					Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan usia produktif yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah peserta deteksi dini	1.000 orang	550.870.052,00
										Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah peserta rapat koordinasi kawasan tanpa rokok	60 orang	40.079.400,00
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kawasan tanpa rokok	1 laporan	
											Jumlah peserta sosialisasi kesehatan indera/fungsional	50 orang	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan lansia yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah laporan hasil pendataan sasaran usia lanjut	5 laporan	403.624.500,00	
											Jumlah formulir Instrumen GDS (Geriatric Depression Scale), AMT (Abbreviated Mental Test), dan Instrumen ADL (Activity Daily Living) yang tersedia	6.000 formulir		
											Jumlah peserta Penguatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kota Blitar yang lulus	55 orang peserta		
											Jumlah peserta Orientasi Peningkatan Pelayanan Lansia	35 orang peserta		
					Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 orang	102.208.700,00	
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1 laporan		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah peserta pembinaan pelayanan kesehatan diabetes melitus di Posbindu	40 orang	68.292.400,00
					Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan ODGJ berat yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah laporan layanan Kesehatan Jiwa oleh dokter spesialis kesehatan jiwa	12 laporan	409.638.400,00
											Jumlah peserta sosialisasi Psikoedukasi Keluarga ODGJ dengan lintas sektor	90 orang	
											Jumlah peserta rapat koordinasi TPKJM (Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat) Kota Blitar	45 orang	
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1 laporan	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah peserta Sosialisasi dan Deteksi Dini Bahaya NAPZA	40 orang	4.536.500,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang terduga TBC yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis yang tersusun	4 laporan	482.827.900,00	
											Jumlah peserta Workshop DPPM (Distric Publik Private Mix) yang lulus	60 orang		
											Jumlah peserta Rapat koordinasi RS Satelit Tuberkulosis Resisten Obat	50 orang		
											Jumlah mantan penderita tuberkulosis yang dilakukan pendampingan	50 kasus		
											Jumlah peserta Advokasi dan sosialisasi Koalisi Organisasi Profesi (KOPI) TBC	40 orang		
											Jumlah peserta Penguatan Forum Kelompok Masyarakat Peduli TBC- TOSS TB (Temukan TBC Obati Sampai Sembuh)	40 peserta		
											Jumlah peserta Pertemuan Jejaring Public Private Mix (PPM) Penanggulangan TBC	50 peserta		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (SPM)	100%		Persentase standar baku pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV yang terlaksana	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah reagen yang tersedia	5 reagen	390.988.800,00	
											Jumlah promosi kesehatan penanggulangan HIV	2 promosi kesehatan		
											Jumlah peringatan hari AIDS sedunia	1 even		
											Jumlah peserta rapat koordinasi komisi penanggulangan AIDS	40 orang		
											Jumlah peserta Rapat Koordinasi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Pengetahuan Komprehensif HIV-AIDS pada Usia 15-24 th	100 orang		
											Jumlah peserta Pertemuan Pemberdayaan Dukungan Sebaya HIV-AIDS	30 orang		
											Jumlah peserta Pertemuan Penguatan Jejaring Populasi Kunci	50 orang		
											Jumlah peserta rapat koordinasi adherensi perawatan dukungan dan pengobatan (PDP) bagi Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA)	120 orang		
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pencegahan penularan ibu ke anak (PPIA) HIV	1 laporan		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Jumlah peserta OJT (On the Job Training) layanan Konseling tes HIV	40 orang	
											Jumlah laporan hasil supervisi/ monev layanan HIV	1 laporan	
					Persentase masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	100%		Persentase masyarakat Kota Blitar yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional	100%	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang dengan segmen kepesertaan PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja Pemda) yang terbayarkan Jaminan Kesehatannya (PBID)	65.448 orang	33.654.945.062,00
								Persentase Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang terlayani	100%		Jumlah SPM (Surat Pernyataan Miskin) yang terlayani	190 orang	
											Jumlah laporan monev pembiayaan kesehatan di fasyankes	1 laporan	
										Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah laporan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	36 laporan	11.306.073.780,00
					Persentase kelurahan UCI (Universal Child Immunization)	95,2%		Persentase bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	90,25%	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah peserta rapat koordinasi imunisasi (TT WUS) yang diselenggarakan	35 orang	245.603.100,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Jumlah peserta orientasi bagi petugas imunisasi yang lulus	70 orang	
											Jumlah laporan monev pelayanan imunisasi	5 laporan	
											Jumlah laporan supervisi fasilitatif	1 laporan	
											Jumlah laporan pengelolaan rantai dingin	12 laporan	
					Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala Kota Blitar yang tertangani	100%		Cakupan kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	1 laporan	321.507.130,00
										Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah sasaran CJH (Calon Jamaah Haji) yang diberikan layanan kesehatan	200 orang	802.903.000,00
											Jumlah peserta rapat koordinasi Surveilans kesehatan	90 orang	
											Jumlah peserta bimbingan teknis Surveilans kesehatan	100 orang	
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan surveilans kesehatan	2 laporan	
										Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penanggulangan penyakit menular yang disebabkan vektor	5 laporan	1.053.150.655,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Jumlah biolarvasida yang tersedia	1 jenis	
											Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyakit menular langsung	6 laporan	
											Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyakit menular bersumber binatang yang tertangani (leptospirosis, rabies, kecacingan, filariasis)	4 laporan	
											Jumlah laporan hasil pelacakan kasus dan pendampingan penyakit menular dan tidak menular	1 laporan	
											Jumlah peserta rapat koordinasi pelayanan penyakit	90 orang	
											Jumlah laporan monev penyakit tidak menular	2 laporan	
										Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit	3.241 spesimen	1.041.300.000,00
										Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	240 kasus	89.083.600,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Jumlah laporan monev respon cepat sistem kewaspadaan dini dan respon wabah	1 laporan	
								Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis yang tersedia	100%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang terlayani	360 orang	2.295.518.440,00
					Persentase lingkungan yang memenuhi standar kesehatan	60%		Persentase sarana air minum dengan risiko rendah dan sedang	66%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM yang didampingi dan diverifikasi	10 kelurahan	129.774.600,00
							Persentase Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan	78%	Jumlah peserta rapat koordinasi penyehatan lingkungan		180 orang		
							Persentase Kelurahan yang melaksanakan STBM yang dibina	47,62%	Jumlah fasyankes dengan Pengelolaan Limbah B3		9 fasyankes		
							Jumlah Tatanan Kota Sehat yang dibina	9 jumlah tatanan	Jumlah pokja pasar yang terbentuk dan dibina		2 poksar		
									Jumlah air bersih/ sarana air minum yang diperiksa		35 sarana		
									Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan STBM (Workshop STBM)		1 laporan		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah peserta rapat koordinasi Forum Blitar Kota Sehat	75 orang	373.760.300,00
											Jumlah dokumen Kota Sehat yang tersusun	1 dokumen	
											Jumlah Lokus Kota Sehat yang dibina dan disupervisi	20 lokus	
											Jumlah Lokus Kota Sehat yang diverifikasi tingkat propinsi / Nasional	20 lokus	
											Jumlah laporan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Kota Sehat	1 laporan	
											Jumlah Pokja Kelurahan sehat, FKKS dan FBKS yang mengikuti Orientasi pengembangan Tatanan Kota Sehat	60 orang	
								Persentase program prioritas yang dipromosikan	100%	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah promosi/ kampanye kesehatan melalui media	5 jenis	266.618.000,00
											Jumlah promosi kesehatan melalui penyuluhan langsung	1 jenis	
										Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	8.056 keluarga	63.565.500,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	3 fasyankes	106.350.000,00d
					Persentase penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja pada sektor formal dan informal yang dibina	25%		Jumlah Pos UKK yang terbina	8 Pos UKK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah laporan monev UKK	1 laporan	128.152.700,00
								Persentase Kelompok masyarakat yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani	40%		Jumlah peserta Pembinaan kesehatan Olahraga	100 orang	
								Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan K3 Perkantoran	10%		Jumlah orang yang diukur kebugarannya	170 orang	
											Jumlah peserta orientasi K3 perkantoran	40 orang	
											Jumlah perkantoran yang menyelenggarakan K3 perkantoran	3 kantor	
											Jumlah karyawan yang diperiksa Par Q test	90 orang	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	100%		Persentase FKTP (Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama), penunjang dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai standar	100%	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah bahan kesehatan pemeriksaan klinik yang tersedia	75 bahan	2.050.845.400,00
											Jumlah bahan kesehatan dan bahan kimia pemeriksaan mikrobiologi	42 bahan	
											Jumlah bahan kesehatan dan bahan kimia pemeriksaan kimia	47 bahan	
											Jumlah Pengelolaan Limbah Laboratorium yang terpenuhi	12 bulan	
											Jumlah pemeliharaan sarana prasarana yang terpenuhi	8 jenis	
											Jumlah Pelayanan Umum Laboratorium yang terpenuhi	5 jenis	
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemeriksaan laboratorium kesehatan	1 laporan	
											Jumlah peserta sosialisasi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat	60 orang	
											Jumlah peserta sosialisasi pemeriksaan laboratorium klinik	35 orang	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
											Jumlah gedung yang terpelihara	1 unit		
										Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan monev akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan yang tersusun	1 laporan	67.363.400,00	
											Jumlah laporan monev pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat	2 laporan		
											Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dibina	3 faskes		
								Persentase penyehat tradisional yang berizin	3%	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah laporan monev pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional	1 laporan	14.328.800,00	
											Jumlah penyehat tradisional yang dibina	40 hatra		
								Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah pelayanan kegawatdaruratan yang tersedia / terselenggara	12 layanan/laporan	69.568.600,00	
												Jumlah Cluster Kesehatan yang terbentuk		5 cluster
							Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	100%	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah lembaga yang mendapatkan hibah	1 lembaga	2.850.000.000,00	
														Jumlah gedung yang direnovasi

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	2 jenis alat kesehatan	2.975.207.080,00
								Persentase obat dan sediaan farmasi yang tersedia	100%	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis Obat esensial Puskesmas yang tersedia	40 jenis	1.294.763.908,00
											Jumlah Jenis Obat PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) Puskesmas yang tersedia	16 jenis	
										Pengadaan Bahan Pakai Habis	Jumlah BMHP Covid-19 yang tersedia	1 jenis BMHP	3.260.517.312,00
											Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Pelayanan kesehatan dasar yang tersedia	1 jenis BMHP	
										Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara/ terkalibrasi/ tersertifikasi	2 alkes	350.700.416,00
											Jumlah laporan monev data ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)	1 laporan	
										Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	12 paket	57.395.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi	100%	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola/ tersedia	2 sistem	67.527.600,00
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin yang dibina	100%	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah laporan monev pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	1 laporan	5.762.600,00
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik tenaga kesehatan	100%	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Praktik tenaga kesehatan berijin yang dibina	400 nakes	67.444.903,00
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dibina	100%	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah perencanaan sumber daya manusia kesehatan yang terbina	2 macam	90.672.300,00
						Jumlah kelompok dokter internsip yang didayagunakan					2 angkatan		
						Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan					5 laporan binwas		
						Jumlah uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang diselenggarakan					5 ukom		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	13%	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan yang lulus	68 orang	122.200.000,00
											Jumlah pengelola fasilitas kefarmasian yang menjadi peserta bimbingan teknis	190 orang	
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengelolaan fasilitas layanan kefarmasian yang sesuai standar	100%	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin yang dibina	100%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah peserta Gema Cermat tentang pengelolaan obat dan bahan berbahaya	150 orang	113.474.800,00
											Jumlah laporan monev pengelolaan alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	4 laporan	
											Jumlah peserta sosialisasi kosmetika yang aman	100 orang	
											Jumlah apoteker yang mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian di fasyanfar	60 orang	
							Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina	100%	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah peserta KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Pemanfaatan dan Keamanan Mutu Alkes dan PKRT	180 orang	28.398.800,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Perusahaan Rumah Tangga						
							Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT yang berizin	91%	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah peserta penyuluhan keamanan pangan	70 orang	121.390.000,00
							Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase makanan jajanan/kantin dan sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	79%	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah peserta bimbingan teknis keamanan pangan	328 orang	
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase IRTP (Indutri Rumah Tangga Pangan) yang dibina dan tersertifikasi	91%	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak	Jumlah laporan hasil pengkajian ulang sertifikat produksi	1 laporan	
											Jumlah pengelola makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang menjadi sasaran pembinaan keamanan pangan (Warung / Kantin sekolah)	35 pedagang kaki lima	2.745.500,00
											Jumlah peserta rapat koordinasi dan Tindak lanjut TKP2MO	120 orang	119.812.600,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Lanjut Pengawasan			
											Jumlah sampel makanan siap saji yang diperiksa	20 sampel	
											Jumlah laporan inventarisasi sarana industri rumah tangga pangan (IRTP)	2 laporan	
											Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan sarana industri rumah tangga pangan	4 laporan	
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,50	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kelurahan siaga aktif purnama mandiri	57,14%	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga sehat	52%	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Posyandu yang dibina	232 Posyandu	2.719.243.000,00
								Persentase Posyandu Strata Purnama Mandiri	94,6%		Jumlah laporan hasil monev kelurahan siaga dan UKBM yang tersusun	4 laporan	
								Persentase TTU (Tempat-tempat Umum) ber-PHBS	53%		Jumlah laporan hasil evaluasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	1 laporan	
								Jumlah UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang dibina	3 kelompok UKBM		Jumlah peserta KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)	280 orang	
											Jumlah Poskestren yang didampingi	13 Poskestren	
											Jumlah Saka Bhakti Husada dibina	3 kwaran	
							Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase upaya promotif dan preventif yang terselenggara	85%	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah upaya preventif dan promotif gerakan gaya hidup bersih dan sehat	2 macam	943.885.200,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang terfasilitasi pengembangannya	1 kelompok UKBM	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Taman Posyandu yang dilakukan supervisi pengembangan	40 TP	58.482.600,00
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dokumen	46.260.000,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	7 dokumen	38.095.900,00
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	1 dokumen	10.000.000,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	254 ASN	23.938.664.707,00
										Jumlah pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengelola barang yang mendapatkan honorarium	45 pejabat		
										Jumlah tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 yang mendapatkan insentif	134 nakes		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	3 dokumen	12.240.000,00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersedia	3 laporan	13.360.800,00
										Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang disosialisasikan	4 even	69.569.300,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah macam Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	16 macam	38.063.400,00
										Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	21 macam	14.363.500,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	46 macam	91.621.600,00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	9 macam	58.302.400,00
											Jumlah lembar penggandaan	25.753 lembar	

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	2 macam	7.200.000,00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi	120 rakor	527.794.500,00
									100%	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan mesin kantor yang tersedia	1 jenis	105.866.900,00
									100%	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	244.607.400,00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor	26 orang/bln	1.809.700.283,00
										jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12 bulan		
									100%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 kendaraan	227.676.700,00
										Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dibayarkan pajaknya	43 kendaraan		

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	3 macam	43.036.400,00
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehab		105.108.800,00

Blitar, 3 Februari 2023

KETUA DINAS KESEHATAN

KOTA BLITAR



dr. BHARMA SITI AWAN, M.MKes

NIP. 19680305 200112 1 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd.**
Jabatan : **Walikota Blitar**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Blitar, 3 Januari 2022

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar,

dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KESEHATAN KOTA BLITAR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	583,33 per-100.000 kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	10,40 per-1.000 kelahiran hidup
		Prevalensi balita stunting	7,05%
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	15,10%
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	45%
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	0,500 (skala)
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A (87)

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.888.256.972,00	APBD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	65.520.587.677,00	APBD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	280.322.100,00	APBD
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	356.361.400,00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.871.667.790,00	APBD
Jumlah Anggaran	105.917.195.939,00	

Blitar, 3 Januari 2022

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar,

dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Blitar
Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu	Jumlah kematian ibu karena kehamilan dan 42 hari setelah melahirkan pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu di Kota Blitar dikali konstanta (100.000) bayi lahir hidup	583,33 per-100.000 kelahiran hidup	172,31 per-100.000 kelahiran hidup	179,81		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	522.840.300,00	500.060.600,00	95,64	
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu di daerah tertentu dibagi Jumlah kelahiran hidup dikali Konstanta (1.000) bayi lahir hidup	10,40 per-1.000 kelahiran hidup	9,19 per-1.000 kelahiran hidup	116,63		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	106.358.800,00	84.334.400,00	79,29	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Prevalensi Balita Stunting	Jumlah balita stunting pada tahun tertentu, di daerah tertentu dibagi jumlah balita diukur dikali 100%	7,05%	5,26%	125,39		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.405.586.000,00	1.369.296.800,00	97,42	
		Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah kunjungan baru di fasyankes (luar dan dalam gedung) dibagi Jumlah penduduk pada tahun yang sama dikali 100%	15,10%	34,62%	229,27		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.641.775.319,00	48.538.890.401,41	88,83	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi Jumlah Fasyankes yang ada dikali 100%	45%	26,19%	58,2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.063.980.116,00	10.311.079.459,36	78,93	
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	280.317.203,00	274.880.100,00	98,06		
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	385.821.700,00	344.846.593,00	89,38		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		IKS (Indeks Keluarga Sehat) Kota Blitar	Jumlah keluarga dengan IKS >0,800 dibagi Jumlah keluarga dikali 100%	0,50	0,35	70		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.721.610.800,00	2.757.719.960,00	74,10	
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Kota Blitar	A	A	100		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.401.532.590,00	26.259.783.254,89	95,83	

Blitar, 3 Februari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BLITAR

dr. DHARMA SETIAWAN, M.MKes.
NIP. 19680305 200112 1 003